

**PEMBELAJARAN KEBIJAKAN (*POLICY LEARNING*)
DALAM PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) (Studi
Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Provinsi Sumatera Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

Niki Nauli Tua Pasaribu

NIM.07011281924092

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
PEMBELAJARAN KEBIJAKAN (*POLICY LEARNING*) DALAM
PROGAM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS
MASYARAKAT (PATBM) (STUDI PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

NIKI NAULI TUA PASARIBU
NIM. 07011281924092

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juli 2023

Pembimbing,

Anang Dwi Santoso, S.AP.,M.PA
NIP. 199310072019031012



Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

PEMBELAJARAN KEBIJAKAN (*POLICY LEARNING*) DALAM PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) (STUDI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN)

SKRIPSI

Oleh:

NIKI NAULI TUA PASARIBU
07011281924092

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
pada Tanggal 18 Juli 2023
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Anang Dwi Santoso, S.AP., M.PA
Ketua

Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
Anggota

Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP
Anggota



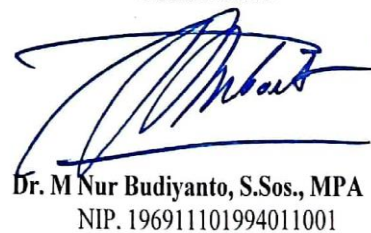
Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M. Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

PERYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Niki Nauli Tua Pasaribu

NIM : 07011281924092

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya dengan judul “pembelajaran kebijakan (*policy learning*) dalam program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi Sumatera Selatan” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan,

Indralaya, Juli 2023



Niki Nauli Tua Pasaribu

NIM. 07011281924092

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu?
Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, menyertai engkau, ke
manapun engkau pergi.” (Yosua 1 : 9)

“Selalu ada Pelangi sehabis hujan”

~Niki Pasaribu~

Skripsi ini saya persembahkan pada:

- Tuhan Yesus Kristus
- Kedua orangtuaku yang kukasihi
- Saudara-saudaraku yang kukasihi
- Sahabat-sahabatku terkasih
- Para pemberi ilmu dan almameterku

ABSTRACT

PATBM Program is protection place with children, however to able seen from year 2019-2022 violence against children in South Sumatra increased every year. PATBM Program is not maximal. As a result of the PPPA Department in Province of South Sumatra as a hand pan of the PPA ministry perform learning in the PATBM Program (Study on PPPA Department in South Sumatra). The research method used is a qualitative method. Data analysis technique using triangulation techniques. The result explain of this study by PPPA Department in South Sumatra by PATBM Program from 2019-2022 had not done the previous policy learning.

Keyword: PPPA Department, Policy Learning, PATBM Program

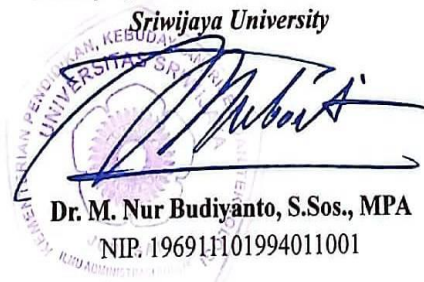
Advisor,

Anang Dwi Santoso, S.AP.,M.PA
NIP. 199310072019031012



Indralaya, July 2023

Head Of Department Of Public Administration
Faculty Of Social and Political Sciences
Sriwijaya University



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRAK

Program PATBM merupakan wadah perlindungan terhadap anak, akan tetapi dapat dilihat dari tahun 2019-2022 angka kekerasan terhadap anak di Sumatera Selatan meningkat setiap tahunnya. Program PATBM berarti belum maksimal. Oleh karena itu pihak Dinas PPPA provinsi Sumatera Selatan sebagai perpanjangan tangan dari kementerian PPA seharusnya melakukan *policy learning* dalam program PATBM. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis *policy learning* dalam program PATBM (studi pada Dinas PPPA provinsi Sumatera Selatan). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Teknik analisis data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Dinas PPPA provinsi Sumatera Selatan dalam program PATBM pada tahun 2019-2022 belum melakukan *policy learning* sepenuhnya.

Kata Kunci: Dinas PPPA, *Policy Learning*, Program PATBM

Pembimbing,

Anang Dwi Santoso, S.AP.,M.PA
NIP. 199310072019031012



Mengetahui, Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera dan suji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“*Policy learning* dalam Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) (Studi Kasus Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan)”**. Skripsi ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Jurusan Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, seta sebagai sarana dalam mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, dan tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada bapak, ibu, dan abang-abangku yang telah mendukung dan memberikan semangat dan juga terima kasih kepada:

1. Orang tua ku, bapak Jansen Pasaribu dan ibu Rusmiaty br. Sidabutar. Serta abang Moses Pasaribu dan Bob Pasaribu yang telah memberikan dukungan, kasih dan doanya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfotri, M.Si, selaku Dekan FISIP Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M selaku Wakil Dekat I FISIP Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd selaku Wakil Dekan II FISIP Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si, selaku Wakil Dekan III FISIP Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. M.Nur Budiyanto, S.Sos., MPA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Januar Eko, S.IP., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya.

8. Bapak Anang Dwi Santoso, S.AP, MPA selaku dosen pembimbing dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukannya selama penyusunan penelitian ini
9. Seluruh dosen, staff dan seluruh pegawai FISIP Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Henni Yulianti, S.IP., M.M, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
11. Ibu Musharmina, S.AP Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Ibu Bariyanti Arthini, S.E., M.Si, Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak, Ibu Dra. Hj. Riatni, Kepala Seksi Pembinaan Layanan Perempuan dan Anak, Bapak Said, S.Sos., M.Si Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan, Mba Claudia dan Kak Taufan.
12. Temanku terkasih, Angelina br. Sihombing, Deva br. Siburian dan Natalia br. Sitorus yang telah memberikan bantuan dalam bentuk verbal dan non verbal kiranya Tuhan yang membalas kebaikan kalian.
13. Teman kampusku, Nabila, Nadia, Yenni, Salsa, dan Riana yang telah membantu saya waktu dalam kesusahan menyelesaikan skripsi.
14. Kakak-kakak ku “Aunties” yang telah senantiasa mendoakan adik manisnya ini.
15. Teman-teman gereja ReNa HKBP Sukarami yang mendoakan dalam lancarnya skripsi ini.
16. Terimakasih untuk semua teman-teman seperjuangan Administrasi Publik Angkatan 2019 terkhusus Kelas B Indralaya yang telah memberikan bantuan dan kenangan selama masa perkuliahan
17. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan penelitian ini.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Dengan ini, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca, akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xivii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Landasan Teori.....	10
2.2. Kebijakan Publik.....	10
2.3. <i>Policy learning</i>	12
2.4. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).....	15
2.4.1 Pengertian Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)...	15
2.4.2 Tujuan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	15
2.4.3 Sasaran Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	16
2.4.4 Prinsip Pelaksanaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	17
2.4.5 Ruang Lingkup Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	17

2.5. Kerangka Berpikir.....	19
2.6. Penelitian Terdahulu.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1. Jenis Penelitian.....	27
3.2. Definisi Konsep.....	27
3.3. Fokus Penelitian.....	28
3.4. Jenis dan Sumber Data	28
3.5. Informan Penelitian.....	29
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.7. Teknik Keabsahan Data.....	30
3.8. Teknik Analisis Data	31
3.10. Sistematika Penulisan.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
4.1.1 Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Selatan.....	35
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Selatan.....	36
4.1.2.1 Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Selatan.....	36
4.1.2.2 Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Selatan.....	38
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Selatan.....	48
4.2 Informan Penelitian.....	42
4.3 Hasil Penelitian	42
4.3.1 Instrumental.....	43
4.3.1.1. Kinerja Program	43
4.3.1.2 Mekanisme Program	49
4.3.2 <i>Social</i>	58
4.3.2.1 Inovasi Program.....	58
4.3.3 <i>Politic</i>	71

4.3.3.1 Advokasi Kebijakan.....	71
4.4 Pembahasan.....	77
4.4.1 Instrumental.....	77
4.4.2 <i>Social</i>	79
4.4.3 <i>Politic</i>	80
BAB V PENUTUP.....	82
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran.....	82
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan di Indonesia.....	2
Tabel 1.2 Jumlah Kasus dan Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak yang Terlayani di Provinsi Sumatera Selatan.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	28
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	34
Tabel 4.1 Informan Penelitian.....	42
Tabel 4.2 Pembentukan PATBM Kabupaten/Kota Provinsi Sumsel.....	47
Tabel 4.3 Matriks Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	19
Gambar 3.1 <i>Interactive model of data analysis of Miles, Huberman, and Saldana</i> (2014).....	31
Gambar 4.1 Struktur Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas.....	49
Gambar 4.2 Struktur Bidang Pengarustamaan Gender.....	49
Gambar 4.3 Struktur Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.....	50
Gambar 4.4 Struktur Bidang Data dan Informasi Gender.....	50
Gambar 4.5 Struktur Bidang Tumbuh Kembang Anak.....	51
Gambar 4.6 Struktur UPTD PPA.....	51
Gambar 4.7 Sosialisasi Desa Percontohan Kab/Kota Tahun 2019.....	61
Gambar 4.8 Aktivistis PATBM Kab. OI.....	61
Gambar 4.9 Aktivistis PATBM Kab. OKI.....	62
Gambar 4.10 Aktivistis PATBM Kab. PALI.....	62
Gambar 4.11 Aktivistis PATBM Kab. OKUT.....	63
Gambar 4.12 Aktivistis PATBM Kab. Lahat.....	63
Gambar 4.13 Aktivistis PATBM Kab. Lubuk Linggau.....	64
Gambar 4.14 Daftar Nama Narasumber Kegiatan Penguatan PATBM.....	65
Gambar 4.15 Daftar Peserta Kegiatan Penguatan PATBM.....	65
Gambar 4.16 Kegiatan Penguatan PATBM.....	66
Gambar 4.17 Pola Kegiatan PATBM Prov. Sumsel.....	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	88
Lampiran 2 Pedoman Observasi	90
Lampiran 3 Hasil Wawancara.....	28
Lampiran 4 Foto Kegiatan Wawancara dan Observasi	95
Lampiran 5 Surat Tugas Dosen Pembimbing	97
Lampiran 6 Kartu Bimbingan Usulan Penelitian	98
Lampiran 7 Lembar Revisi Seminar Usulan Penelitian.....	99
Lampiran 8 Surat Izin Penelitian.....	100
Lampiran 9 Surat Balasan dari Dinas PPPA Prov. Sumsel untuk Penelitian.....	101
Lampiran 9 Kartu Bimbingan Skripsi	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia saat ini dikategorikan dalam keadaan darurat. Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak (UU 23/2022 Tentang Perlindungan Anak) mendefinisikan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak memiliki hak-hak sebagaimana dimuat pada Pasal 4 UU 23/2022 Tentang Perlindungan Anak “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Undang-undang perlindungan anak merupakan payung hukum dan sebagai dasar perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia.

Kekerasan terhadap anak sebagian besar dilakukan oleh orang tua, saudara, paman, bibi, teman, guru, tetangga, dan orang asing. Sudarti berpendapat bahwa ada empat jenis kekerasan: Kekerasan fisik (tindakan yang biasanya berhubungan dengan mendorong, mencubit, meninju, menendang, membakar luka, memukul dengan alat, melukai dengan alat tajam, memercikkan dengan air panas atau kimia, menembak dan tenggelam); Kekerasan psikologis (tindakan yang menyampaikan kata-kata buruk sebagai pelepasan emosi); Kekerasan seksual (tindakan yang dilakukan dengan kontak seksual yang terdiri dari memaksa dan menyerang orang tanpa mempertimbangkan hubungan di antara mereka); dan Neglect (suatu bentuk

kelalaian dalam menyediakan kebutuhan seperti kesehatan, makanan, pakaian, dll) (Dasadwiastaning, 2022).

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Kekerasan di Indonesia

Jenis Kekerasan	Tahun 2019	Tahun 2020
Kekerasan Fisik	3.401	2.900
Kekerasan Psikis	2.527	5.069
Kekerasan Seksual	6.454	5.628
Pencabulan Terhadap Anak	106	165
Tindak Pidana Perdagangan Orang	111	256
Penelantaran	850	652
Kekerasan Lainnya	1065	1.270

Sumber: CNN Indonesia

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah kasus kekerasan di Indonesia dari tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami peningkatan kasus terhadap kekerasan anak terutama pada kekerasan seksual, pencabulan dan eksploitasi anak. Tingginya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia, perlu menjadi perhatian dari pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan memiliki strategi-strategi yang telah dirancang melalui kebijakan publik yang diharapkan kebijakan tersebut dapat menanggulangi masalah publik. Kebijakan-kebijakan yang dibuat diharapkan dapat mewujudkan sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Ada dalam satu tahun sudah kelihatan hasil dari kebijakan atau program tersebut, ada juga yang butuh waktu bertahun-tahun untuk melihat

hasilnya dan ada juga yang bertahun-tahun akan tetapi menghasilkan hasil yang minim. Oleh karena itu perlu yang adanya pembelajaran kebijakan (*policy learning*) agar dapat mengetahui saja kendala-kendala atau masalah-masalah yang ada dalam suatu kebijakan sehingga dapat menemukan strategi yang tepat. Dunlop dan Radaelli (2018) berpendapat bahwa *Policy learning* yaitu mengetahui penyebab *learning*, mekanisme, proses perkembangan dalam kebijakan baik di dalam maupun luar negara dan mengetahui pemicu dan hambatan mekanisme *learning* (Polman, 2018). *Policy learning*, menurut Sabatier adalah "modifikasi pemikiran atau niat perilaku yang relatif bertahan lama yang berasal dari pengalaman dan berkaitan dengan pencapaian (atau revisi) tujuan kebijakan"(Laatsit, 2019). Seseorang dapat belajar dengan melihat masa lalu kelembagaan dan organisasinya sendiri, inovasi dan keberhasilan dalam kebijakan publik, dan studi evaluasi dengan asumsi bahwa evaluasi menjawab pertanyaan yang tepat dan bahwa ada proses di mana indikator dan tinjauan kebijakan mengarah pada pemanfaatan pengetahuan (Radaelli, 2008).

Provinsi Sumatera Selatan merupakan penyumbang kasus kekerasan terhadap anak yang cukup banyak setiap tahunnya. Jumlah kasus dan korban kekerasan terhadap anak di provinsi sumatera selatan dapat diakses melalui aplikasi SIMFONI yang dikelola oleh bidang data dan informasi gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Data kasus dan korban kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Kasus dan Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak yang Terlayani di Provinsi Sumatera Selatan

Tahun	Anak	
	Laki-Laki	Perempuan
2020	75	165
2021	115	171
2022	73	219

Sumber: Aplikasi SIMFONI DPPPA Prov. SumSel, 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kasus dan korban kekerasan terhadap anak yang terlayani di Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 kasus kekerasan terhadap anak tertinggi terdapat pada daerah kota Palembang dengan jumlah 36 kasus, setelah itu pada tahun 2021 kabupaten Muara Enim merupakan penyumbang jumlah kasus terbanyak dengan jumlah 49 kasus dan pada tahun 2022 kasus anak terbanyak dengan jumlah 37 kasus adalah kabupaten Ogan Ilir.

Data dari kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumatera Selatan belum seluruhnya terdata karena masih ada kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan. Oleh karena itu, diperlukan peran dan fungsi dari lembaga atau institusi dalam membentuk peraturan dan kebijakan untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak-anak. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dan terlibat dalam program-program pemerintah dalam penanggulangan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebagai contoh program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah suatu gerakan di tingkat masyarakat yang berbentuk jaringan atau kelompok untuk

melakukan kolaborasi dalam mencapai tujuan dari perlindungan anak. Selain itu, PATBM berfungsi sebagai penggerak inisiatif preventif yaitu melakukan pendekatan-pendekatan dalam membentuk kesadaran masyarakat terkait pemahaman, persepsi, sikap dan tindakan terhadap perlindungan anak. Program atau gerakan yang ada perlu dilakukan kontrol dan evaluasi dengan memanfaatkan kelembagaan yang sudah ada atau membentuk kelembagaan baru. (Erbatas, 2016)

Program-program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan dapat direalisasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat menurun setiap tahunnya. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan membuat program, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Program Kota Layak Anak merupakan program yang menciptakan suatu kota dapat merencanakan, menetapkan dan menjalankan pembangunan kota yang berorientasi terhadap hak dan kewajiban anak, sehingga membantu pertumbuhan dan perkembangan anak yang baik;
2. Program Desa Ramah Perempuan dan Anak (DRPPA) merupakan program yang mengabungkan sudut pandang gender dan hak anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkesinambungan dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

3. Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan suatu gerakan di tingkat masyarakat yang berbentuk jaringan atau kelompok untuk melakukan kolaborasi dalam mencapai tujuan dari perlindungan anak.

Pada tahun 2016, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengagas suatu Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Program PATBM merupakan salah satu strategi Kementerian PPPA sebagai upaya membentuk jaringan atau kelompok dari masyarakat dengan pola kerja secara terkoordinasi yang berorientasi pada perlindungan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Sumatera Selatan merupakan instansi yang meneruskan program PATBM agar cepat terealisasinya dan diharapkan masalah kekerasan terhadap anak terselesaikan, Dinas PPPA Prov. Sumatera Selatan mulai melaksanakan program PATBM dari tahun 2017 sampai sekarang. Diawali dengan penunjukan aktivis di Sumatera Selatan kemudian melakukan sosialisasi dan penunjukan aktivis pada setiap kota/kab agar aktivis yang telah ditunjuk dapat meneruskan sosialisasi tersebut kepada masyarakat yang ada di kelurahan/desa. Provinsi Sumatera Selatan memiliki sebanyak 1783 terbentuknya PATBM di setiap kelurahan/desa sampai dengan Januari 2022 dan setiap kelurahan/desa memiliki kurang lebih 10 aktivis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang juga merupakan salah satu fasilitator PATBM terkait faktor-faktor penghambat yang ada dalam pelaksanaan program PATBM, sebagai berikut:

“sampai saat ini kendala atau faktor yang menghambat program PATBM ini kurangnya anggaran karena tidak ada anggaran dari pusat atau kementerian, dana program ini ditanggung oleh Dinas PPPA prov. Sumsel, kurangnya minat masyarakat, kurangnya aktivis di setiap kelurahan/desa.” (Wawancara, Agustus 2022).

Berdasarkan dari laporan-laporan para aktivis pada kegiatan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) pada juli 2022 dalam pelaksanaan penguatan PATBM, ditemukan juga kendala-kendala yang sama seperti kurangnya aktivis setiap desa/kelurahan sehingga terjadi keterlambatan sosialisasi mengenai program, kurangnya dana, kurangnya minat masyarakat dan kendala-kendala lainnya yang menjadi faktor penghambat dalam perwujudan program ini.

Berdasarkan urain diatas penelitian ini bertujuan untuk mengamati apakah pada tahun 2019-2022 Dinas PPPA melaksanakan yang namanya *policy learning* dalam program PATBM. Karena dengan adanya *policy learning* dapat membuat strategi yang tepat dan cepat yang dimana diharapkan tercapainya tujuan program PATBM yaitu perlindungan anak dan terbentuknya sebuah jaringan masyarakat sehingga jumlah kasus kekerasan terhadap anak setiap tahunnya di provinsi Sumatera Selatan dapat menurun.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pembelajaran Kebijakan (*Policy learning*) Dalam Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Pembelajaran Kebijakan (*Policy learning*) Dalam Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu menambah dan memberikan ilmu pengetahuan hususnya mahasiswa Administrasi Publik, bagi penulis maupun masyarakat bagaimana cara menangani dan mencegah kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan sekitar dengan adanya Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang di buat oleh Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini ialah hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, keluarga, orang tua dan anak mengenai upaya penanganan dan pencegahan dari bentuk kekerasan sehingga membentuk pola pikir masyarakat dalam melindungi anak secara optimal dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mandolang, Y., Daicy Lengkong, F., & Dengo, S. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(79), 1–8.
- Aranguren, M. J., & Larrea, M. (2011). Regional Innovation Policy Processes: Linking Learning to Action. *Journal of the Knowledge Economy*, 2(4), 569–585. <https://doi.org/10.1007/s13132-011-0068-1>
- Ayu Rizky, P., & Mar'iyah, C. (2021). Advokasi Kebijakan RUU PKS: Analisis Pemberitaan Media Perempuan Magdalene.co dan Konde.co. *The Journalish: Social and Government*, 2(2), 36–46. <https://doi.org/10.55314/tsg.v2i2.143>
- Borrás, S. (2011). *Policy learning* and organizational capacities in innovation policies. *Science and Public Policy*, 38(9), 725–734. <https://doi.org/10.3152/030234211X13070021633323>
- Cairney, P., St Denny, E., & Kippin, S. (2021). *Policy learning* to reduce inequalities: the search for a coherent Scottish gender mainstreaming policy in a multilevel UK. *Territory, Politics, Governance*, 9(3), 412–433. <https://doi.org/10.1080/21622671.2020.1837661>
- Dasadwiastaning, V. N. (2022). the Dynamic of Child Protection System Unicef To Reducing Violence Against Children in Indonesia. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 1(9), 1063–1075. <https://doi.org/10.55324/ijoms.v1i9.174>
- Efendi, E. (2023). *Tipe Informasi Bagi Manajemen & Mekanisme Pengambilan Keputusan Dalam Organisasi*. 3, 3042–3048.
- Erbatas, E. D. P. E. T. (2016). *P EDOMAN*. 0–106.
- Laatsit, M. (2019). *Policy learning* in Innovation Policy . In *A Comparative Analysis of European Union Member States* . https://primo.kb.dk/primo-explore/fulldisplay?docid=CBS01000964750&context=L&vid=CBS&search_scope=Blended&tab=default_tab&lang=da_DK
- Moon, J. (1994). *Policy learning*. *Australian Journal of Public Administration*, 53(1), 123–125. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.1994.tb01867.x>
- Moyson, S., & Scholten, P. (2018). Theories on *policy learning*: Existing approaches and future challenges. *Knowledge, Policymaking and Learning for European Cities and Regions: From Research to Practice*, 27–43. <https://doi.org/10.4337/9781786433640.00012>
- Mucharom, M. Z. (2022). Pengaruh Problem Based Learning Terhadap Keaktifan Dan Berpikir Kritis Siswa dalam Karakter Kebangsaan di SPN Polda Jatim. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(1), 494–508.

<https://doi.org/10.36312/jime.v8i1.2701>

- Polman, D. (2018). *Learning from Practical Experience: Implementation Epistemic Communities in the European Union*. In *Learning in Publik Policy*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-76210-4_6
- Putri, N. W. E. (2019). Komunikasi Sosial Dalam Mensosialisasikan Penetapan Kebijakan Gubernur Bali Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. *Jurnal Nomosleca*, 5(1). <https://doi.org/10.26905/nomosleca.v5i1.2783>
- Radaelli, C. M. (2008). Europeanization, *Policy learning*, and New Modes of Governance. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 10(3), 239–254. <https://doi.org/10.1080/13876980802231008>
- Wahyuning, S. (2015). Peran Pengawasan Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat (Dppkbpm) Kota Banjarmasin. *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*, 3(1), 103–111.
- Wahyuningsih, T., Syahrani, H., & Paselle, E. (2020). *PELAYANAN PRIMA PADA DINAS PERPUSTAKAAN KOTA SAMARINDA*. 8(1), 8776–8785.
- Yuningsih, R. (2019). Strategi Promosi Kesehatan dalam Meningkatkan Kualitas Sanitasi Lingkungan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 10(2), 107–118. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v10i2.1391>